

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, padahal jika dilihat secara luas kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang baik sosial maupun budaya dari masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan. Fenomena seperti hal ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal seperti ini dapat kita lihat pada suatu Negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima

oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemiskinan asal mulanya datang dari sikap berpikir yang melahirkan tindakan dan perbuatan miskin.

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Artinya, yang dianggap miskin di dunia ini, di negara manapun individu tersebut berada adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari 1,25 dollar AS per hari. Penentuan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara termasuk Indonesia yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990-2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan 75 negara tersebut yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara ke dollar AS. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik statistik tertentu atau analisis regresi, para peneliti Bank Dunia menemukan bahwa rata-rata garis kemiskinan untuk 15 negara termiskin (*less-developed countries*) adalah sebesar 38 dollar AS per kapita per bulan atau sekitar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Berdasarkan temuan ini, Bank Dunia kemudian menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari.

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan
3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Harniati (2010) mendefinisikan mengenai jenis-jenis dari kemiskinan. Dalam pemaparannya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus didalam sektor pertanian. Dengan kondisi iklim yang tidak

menentu membuat petani tidak mampu untuk mengolah dan memaksimalkan lahan pertanian yang dimiliki.

2. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak adanya kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

3. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Darwis dan Nurmanaf, 2001). Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang menjadikan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif.

Dalam kaitannya dengan penilaian terhadap keberhasilan pembangunan (Seer, 1969 dalam Suhardjo, 1997) mengajukan tiga buah kriteria. Ketiga kriteria tersebut menyoroti masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan. Untuk menilai keberhasilan pembangunan ketiga kriteria tersebut harus dilihat secara bersama-sama. Jika salah satu saja dari ketiga kriteria tersebut gagal

mencapai perbaikan, jangan dikatakan bahwa pembangunan itu berhasil meskipun pendapatan per kapita naik dua atau tiga kali lipat.

Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah merupakan salah satu indikator bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Namun demikian tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin bahwa seluruh penduduk telah menikmati kemakmuran.

2.1.2 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-'ailat (mengalami kekurangan), al-ba'sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu'tarr (yang perlu dibantu) dan al-dha'if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin (QS An-Nisa/4: 135). Sungguh, hal itu memang sejalan dengan sunatullah (baca: hukum alam) sendiri. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, apa pun keyakinannya. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar, pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, rendah dan mentalitas.

Kemiskinan menurut Islam, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha (Q.S. Al-Baqarah/2: 273), penindasan (QS Al-Hasyr/59: 8), cobaan Tuhan (QS Al-An'am/6: 42), dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan (QS Al-Baqarah/2: 61). Namun, di negara kita sesungguhnya faktor-faktor di atas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah.

2.1.3 Teori kemiskinan

Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori dari Emil Salim (1982, dalam Togar Saragih, 2006:5-6) mengemukakan bahwa ciri-ciri orang miskin adalah:

1. Umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatn terbatas.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup memperoleh tanah garapan atau modal usaha, disamping itu tidsk terpenuhinya syarat untuk mendapat kredit perbankan, menyebabkan mereka berpaling ke rentenir.
3. Tidak memiliki tanah, jika adapun relative kecil. Mereka umumnya jadi buruh tani, atau pekerja kasar di luar pertanian. Pekerjaan pertanian bersifat musiman menyebabkan kesinambungan kerja kurang terjamin. Mereka umumnya sebagai pekerja bebas, akibatanya dalam situasi

penawaran tenaga kerja yang besar tingkat upah menjadi rendah dan mendukung atau mempertahankan mereka untuk selalu hidup dalam kemiskinan.

Menurut Thorbecke, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh dipertanian dibandingkan dengan pedesaan karena, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negative terhadap pengangguran di perkotaan; kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan oleh SMERU Research Institute memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang berkelanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.

Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di Negara-negara sedang berkembang merupakan “vicious cycle” (lingkaran yang tidak berujung pangkal). Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan tabungan rendah, dan mengakibatkan rendahnya pembentukan modal.

Van Den Berg (2001) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan istilah yang terkait pengertian relatif maupun absolut. Seseorang atau sebuah keluarga dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain dalam

perekonomian. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai beberapa tingkat absolut pendapatan atau standar hidup, biasanya pada atau dekat dengan sekedar menyambung hidup secara minimum.

Menurut Nurkse dalam Togar Saragih (2006:7) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu:

1. Dari segi penawaran (supply): tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian dapat menyebabkan kekurangan modal dan demikian tingkat produktivitasnya rendah.
2. Dari segi permintaan (demand): di Negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah tersebut dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu, disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya.

Todaro & Smith (2003) membagi kemiskinan berdasarkan penyebabnya menjadi kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu dan atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan struktural melihat kemiskinan sebagai bagian relatif, di

mana terdapat sekelompok masyarakat yang miskin sementara kelompok lainnya tidak miskin. Sedangkan kemiskinan berdasarkan keparahan dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).

2.1.4 Ukuran kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2011).

Menurut William A (2001:377) kemiskinan adalah konsep yang relative, bagaimana cara kita mengukurnya secara obyektif dan bagaimana cara kita memastikan bahwa ukuran kita dapat diterapkan dengan tingkat relevansi yang sama dari waktu ke waktu.

Ada tiga indikator yang diperkenalkan dalam Foster dkk (dalam Tambunan 2003:96) yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris untuk

mengukur kemiskinan. Pertama, the incidence of poverty: persentase dari populasi yang hidup dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya diatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan (Todaro, 1997 dalam Lincolin Arsyad 2004:238).

Kemiskinan secara absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperluakn

untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran financial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Miller dalam Lincoln Arsyad (2004:239) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskina relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Ukuran kemiskinan juga bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi minimumnya berada dibawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung melalui (Coudouel, et.al, 2001 dalam Akhmad Daerobi dkk 2007:8-9) adalah :

1) Head Count Index

Head Count Index ini menghitung presentase orang yang ada di bawah garis kemiskinan dalam kelompok masyarakat tertentu.

2) Sen Poverty

Sen Poverty Index memasukkan dua faktor yaitu koefisien Ginidan rasio H. Koefisien Gini mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar diukur dengan S.

3) Poverty Gap Index

Poverty Gap Index mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemsikinan. Pembilang pada pendektan ini menunjukkan jurang kemiskinan (poverty gap), yaitu Index penjumlahan (sebanyak individu) dari kekurangan dari pendpatan orang miskin dari kgaris kemiskinan. Sedangkan penyebut adalah jumlah inividu di dalam perekonomian (n) dikalikan dengan nilai garis kemiskinan. Dengan ukuran ini, tingkat keparahan kemiskinan mulai terakomodasi. Ukuran kemiskinan akan turun

lebih cepat bila orang-orang yang dientaskan adalah rumah tangga yang paling miskin, dibandingkan bila pengentasan kemiskinan terjadi pada rumah tangga miskin yang paling tidak miskin .

4) Foster-Greer-Torbecke Index

Seperti indeks-indeks diatas, indeks FGT ini sensitive terhadap distribusi jika $\alpha > 1$. Bagian $(Z - Y_i / Z)$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke- I keluarga miskin (Y_i) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan).

Ada berbagai macam criteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, salah satunya criteria miskin menurut Sayogyo. Komponen yang digunakan sebagai dasar untuk ukuran kemiskinan Sayogyo adalah pendapatan keluarga yang disertakan dengan nilai harga beras yang berlaku pada saat itu dan rata anggota tiap rumah (lima orang). Berdasarkan criteria tersebut, Sayogyo membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok (Sumodiningrat, 1999:8) yaitu:

1. Sangat Miskin. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan dibawah setara 250 kg beras ekuivalen setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal di perkotaan.
2. Miskin. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama

setahun untuk penduduk yang tinggal di desa, dan 360 kg beras sampai 480 kg beras pertahun untuk tinggal di perkotaan.

3. Hampir Cukup. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras sampai 480 kg beras dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, dan 720 kg beras pertahun untuk yang tinggal di perkotaan.
4. Cukup. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan lebih dari 480 kg beras setiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang pertahun untuk yang tinggal di perkotaan.

Sedangkan kriteria penduduk miskin BPS, rumah tangga dikatakan miskin (BPS, 2008:17), apabila:

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 m² per anggota rumah tangga
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya
3. Fasilitas air bersih tidak ada
4. Fasilitas jamban atau WC tidak ada
5. Kepemilikan aset tidak tersedia
6. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi
7. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun tidak ada
8. Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,-

2.1.5 Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan

Menurut BPS (2008), faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kepemilikan aset tempat tinggal yang menjadi luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, frekuensi makan sehari, sejumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM). Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab (Widodo, 2006), yaitu :

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut.
4. Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga

sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani, 2005):

1. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desahnya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
2. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
3. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
4. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
5. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Untuk melihat profil kemiskinan dapat dilihat dari profil keluarga rumah tangga miskin. Beberapa karakteristik kepala rumah tangga miskin yang dapat

dianalisis mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, PDRB, pendidikan rendah dan jumlah penduduk.

2.1.5.1 Pendidikan

Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang memperoleh banyak pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan orang dapat bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya. Menurut Sumitro (1994) dalam Fitriana (2008), Menurut Sumitro(1994) dalam Fitriana (2008), mengatakan bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar.

Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pembuahan hasil karya (Simanjuntak, 1985:59). Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenjang pendidikan formal dibagi menjadi:

1. Pendidikan Dasar.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA.

Pendidikan adalah suatu proses dimana terjadi perubahan sikap, perilaku maupun kebiasaan yang buruk yang dimiliki seseorang menjadi lebih baik melalui proses pengajaran. Dengan proses pengajaran tersebut diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam dunia kompetensi kerja yang dikenal cukup sulit. Menurut Riberu (1993:29) bahwa dengan proses pendidikan manusia (masyarakat) akan dapat berfikir secara

rasional dan logis. Dengan berpikir secara rasional maka akan dapat menjadi dasar pijakan untuk memandang dan menyelesaikan permasalahan.

Para pakar ekonomi memandang bahwa pendidikan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Hal ini karena faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi adalah tenaga kerja atau manusia, sementara modal (kapital) dan teknologi menjadi faktor produksi yang digunakan dan dikendalikan oleh manusia. Dalam ekonomi, pada mulanya investasi dilakukan terhadap modal dan teknologi namun dalam perkembangan selanjutnya investasi juga dilakukan terhadap manusia terutama melalui pendidikan (Mohammad Ali, 2009).

Todaro dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (1985) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan. Hal senada juga dikemukakan oleh Hagul dalam studinya tentang pembangunan desa di daerah Yogyakarta (1985). Menurut Hagul (1985), pendidikan merupakan kunci utama mengentaskan masyarakat dari belitan kemiskinan (M. Thamrin Noor, 2005).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Suryahadi dan Sumarto (2001) mengemukakan, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi. Namun pada nyatanya dunia pendidikan di Indonesia masih suram jauh dari kata membanggakan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kondisi sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan. Selain itu faktor kemiskinan turut ambil bagian dari rusaknya dunia pendidikan. Di Indonesia banyak keluarga yang tidak mampu untuk membiayai putra-putrinya untuk mengenyam bangku pendidikan. Dengan kondisi seperti ini banyak sekali masyarakat Indonesia tidak bisa untuk membaca (Buta Aksara). Dengan kondisi seperti ini maka akan sulit mengharapkan penerus bangsa akan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini.

2.1.5.2 Produk domestik regional bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. berdasarkan data beberapa tahun

teakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder) (Wikipedia).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan

besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
2. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:
 - 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
 - 2) Konsumsi pemerintah.
 - 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.

- 4) Perubahan stok.
 - 5) Ekspor netto.
3. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2.1.5.3 Konsumsi Rumah Tangga

Pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Namun dalam pengertian yang lebih luas, konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, nilai gunanya akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis. Berkurang atau habisnya nilai guna barang dan jasa tampak dari semakin tidak mampunya barang dan jasa tersebut memenuhi kebutuhan.

Jika dijabarkan kedalam penjelasan ekonomi makro, maka konsumsi dapat diartikan sebagai variabel makro ekonomi yang dilambangkan dengan huruf "C"

yaitu singkatan dari *consumption*. *Consumption* disini dikategorikan ke dalam klasifikasi konsumen rumah tangga, yaitu pembelanjaan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan pembelian berdasarkan pendapatan yang dimiliki atau diperoleh. Ketika kegiatan konsumsi itu tidak menghabiskan seluruh pendapatan yang dihasilkan, maka sisa uang yang dimiliki disebut sebagai tabungan. Tabungan ini dilambangkan dengan huruf "S" yaitu singkatan dari kata *saving* dalam Bahasa Inggris. Jika dilihat dalam perhitungan makro, maka perhitungan dari penjumlahan seluruh pengeluaran-pengeluaran belanja dan konsumsi masing-masing rumah tangga dalam cakupan satu negara disebut sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat suatu negara.

Apabila semua kebutuhan dapat terpenuhi, akan dicapai suatu keadaan yang disebut makmur dan sejahtera. Makmur dan sejahtera inilah yang selalu diidamkan setiap orang. Sifat mengkonsumsi barang dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Konsumsi secara langsung biasanya dilakukan terhadap barang yang sekali pakai habis, misalnya makanan, minuman, dan sejenisnya. Yang dikonsumsi secara tidak langsung umumnya dilakukan pada barang modal atau barang yang dapat dipakai beberapa kali, misalnya mesin jahit, mobil, perabot rumah tangga, dan sejenisnya.

Teori konsumsi Keynes mengedepankan tentang analisis perhitungan statistik, serta membuat hipotesa berdasarkan observasi kasual. Keynes menganggap perhitungan fluktuasi ekonomi negara dapat dihitung berdasarkan besarnya konsumsi dan pendapatan belanja rumah tangga. Pada pengeluaran rumah tangga, selalu terdapat pengeluaran untuk konsumsi walaupun tidak

memiliki pendapatan. Hal ini disebut sebagai pengeluaran konsumsi otonomus atau *autonomus consumption*.

Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (*absolut income hypothesis*). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk menjelaskan teori Keynes tersebut, maka perlu dibuat rancangan perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Absolut. Teori tersebut menyatakan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan negara yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara, dimana hal tersebut dapat diukur berdasarkan harga konstan. Fungsi Konsumsi Keynes adalah;

$$C = C_0 + cY_d.$$

Dimana;

C_0 adalah konsumsi otonom (*The Autonomus Consumption*).

Y_d adalah pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi.

Rumus Y_d :

$$Y - T_x + T_r.$$

Dimana;

T_x adalah pajak

Tr adalah subsidi atau transfer.

Dari rumus tersebut dapat diperoleh rata-rata konsumsi atau *Average Propensity to Consume* (APC) yaitu perbandingan jumlah konsumsi dibandingkan dengan pendapatan. Kemudian jika terjadi perubahan yaitu tambahan pendapatan sehingga menambah jumlah konsumsi, maka dapat dihitung dengan *Marginal Propensity to Consume* atau perubahan konsumsi yang terjadi karena pendapatan yang meningkat.

Teori Konsumsi Modigliani beranggapan bahwa besarnya konsumsi, tidak harus tergantung berdasarkan dari pendapatan. Karena pada dasarnya pendapatan itu sendiri sangat bervariasi, yaitu ketika seseorang dapat tetap mengatur pendapatannya dari tabungan ketika pendapatan sedang rendah, tinggi, maupun tidak ada pendapatan misal karena pensiun yang telah dibayarkan dimuka, dan lain sebagainya. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai Hipotesis Daur Hidup (*Life Cycle Hypothesis*). Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, dimana kekayaan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, penyesihan pendapatan, warisan, dan lain sebagainya.

Rumah tangga keluarga biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota dalam keluarga memiliki kebutuhan hidup yang sama atau kadang berbeda. Kebutuhan yang sama merupakan kebutuhan yang samasama dirasakan kebutuhannya oleh semua anggota keluarga, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan kasih sayang. Namun ada kalanya kebutuhan tersebut

berbeda. Ayah yang bekerja di kantor tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan anaknya yang pelajar SMP. Begitu juga kebutuhan ibu sebagai ibu rumah tangga, pasti juga berbeda dengan ayah dan anaknya. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen selalu berusaha agar penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhannya. Berbagai kegiatan konsumsi yang umumnya terjadi dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok.
2. Menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan.
3. Menghindari hidup boros atau membeli barang di luar rencana.

Agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi sesuai dengan besarnya pendapatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut.

1. Menyusun anggaran belanja rumah tangga.

Anggaran belanja rumah tangga merupakan rencana yang disusun untuk menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah cara menyusun anggaran belanja rumah tangga:

- 1) Membuat perhitungan jumlah uang yang akan diterima dalam waktu tertentu.
- 2) Membuat daftar kebutuhan dengan menyusun urutan kebutuhan dalam waktu tertentu.

- 3) Membuat perkiraan harga untuk tiap jenis kebutuhan, dengan memperhitungkan kemungkinan adanya kenaikan harga barang dan jasa.
- 4) Membandingkan antara perkiraan pendapatan dengan pengeluaran dalam waktu tertentu.

Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, jika ternyata pendapatan masih ada sisanya maka sisa tersebut dapat ditabung. Sebaliknya, jika perkiraan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan maka akan terdapat kekurangan.

Kekurangan tersebut harus diusahakan untuk dicukupi dengan mengurangi pengeluaran (menghemat) atas kebutuhan yang kurang mendesak atau berusaha mencari tambahan penghasilan yang halal.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola

faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri. Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kalau

perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya. Kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (hutang), maka rumah tanggapun ada yang berhutang, dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga responden yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lain. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan pemilikan surat berharga. Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing art. Sedangkan dalam hal pendapatan, ada rumah tangga responden yang pendapatannya dari upah/gaji saja, dari usaha saja, atau dari gabungan keduanya. Bahkan ada yang dari selain keduanya, misalnya dari pensiun, bagi hasil, dan sebagainya.

Pada Susenas Panel 2009 baik penerimaan maupun pengeluaran dari transaksi keuangan, misal: tabungan, utang, pinjaman uang tidak dicatat.

2.1.5.4 Jumlah Penduduk

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua; orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Suatu wilayah dapat disebut negara apabila memenuhi empat unsur pembentuk negara, unsur ini yang akan mempengaruhi perkembangan negara yang bersangkutan. Unsur pembentuk suatu negara adalah:

1. Rakyat (Penduduk dan Bukan Penduduk)
2. Wilayah, area yang menjadi teritorial negara
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Adanya pengakuan dari negara lain

Dari keempat unsur tersebut, rakyat merupakan unsur pembentuk yang bersifat konstitutif atau mutlak. Sebab keberadaan rakyat akan memberikan pengaruh terhadap suatu wilayah, pemerintah, dan berlanjut kepada pengakuan. Jika tidak ada rakyat maka suatu negara tidak akan bisa berjuang mendapatkan kemerdekaan dan tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Rakyat yang meliputi dua golongan, yakni:

- 1) Penduduk, merupakan masyarakat asli yang lahir dan tinggal di wilayah negara yang bersangkutan dan memiliki orangtua yang juga penduduk negara tersebut.
- 2) Bukan Penduduk, merupakan orang yang menetap di wilayah suatu negara akan tetapi tidak menetap atau tinggal di negara tersebut.

Bukan penduduk ini biasanya adalah para wisatawan mancanegara, duta besar yang merupakan perwakilan dari negara lain. Seseorang yang Bukan Penduduk bisa mendapatkan status Warga Negara di negara kunjungannya dengan melakukan serangkaian prosedur untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memiliki penduduk dari pelbagai etnis adat kebudayaan. Hal ini menjadikan setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, logat bahasa, kebiasaan, dan adat yang berlaku. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, melainkan juga kaya sumber daya manusia beserta kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan salah satu daya tarik untuk menarik

minat para turis mancanegara, sehingga meningkatkan pendapatan negara. Penduduk Indonesia yang beragam suku dan budaya tentunya memiliki definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Perbedaan pendapat ini juga merupakan nilai lebih sebagai salah satu bukti kekayaan bangsa Indonesia secara global. Perbedaan pendapat ini semestinya menjadikan motivasi untuk saling mempererat tali persatuan, agar keutuhan bangsa tetap terjaga.

Thomas Robert Malthus (aliran malthusian) mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu:

1. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
2. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur)

Menurut aliran ini pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara:

1. Preventive checks: pencegahan kehamilan
 - 1) Moral restraint adalah segala usaha untuk mengekang nafsu seksual dalam rangka mengurangi kelahiran.
 - 2) Pengguguran kandungan
 - 3) Penggunaan alat kontrasepsi
 - 4) Homosexuality dan lesbianism

2. Positive checks: pengurangan penduduk via kematian

- 1) Vice (pencabutan nyawa oleh sesama manusia) pembunuhan anak/bayi (infanticide) pembunuhan orang cacat dan orang tua, pemusnahan etnik (genocide)
- 2) Misery (segala keadaan yang berakibat kematian) wabah penyakit, epidemic bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan.

Namun terdapat kritik terhadap teori Malthus, Malthus tidak memperhitungkan hal-hal seperti tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dibidang transportasi, pertanian dan kemungkinan adanya usaha-usaha pembantasan kelahiran serta perbaikan ekonomi yang dapat mengurangi fertilitas.

Hakikat terhadap teori Malthus:

Orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 – 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus. Dalam edisi pertamanya *Essay on Population* tahun 1798 malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu; bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tak dapat ditahan. Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa penduduk cenderung untuk

meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup rill dapat meningkat secara arismetik (deret hitung). Teori malthus tidak berlaku lagi bagi negara-negara barat, tetapi masih berlaku bagi negara-negara Asia. Teori Malthus memang benar dan berlaku sepanjang masa. Penganut golongan ini setuju dengan teori Malthus, meskipun ada beberapa tambahan / revisi. Pengikut Malthus ini disebut Neo Malthusionism. Mereka beranggapan bahwa untuk mencapai tujuan hanya dengan moral restraint (berpuasa, menunda perkawinan) adalah tidak mungkin. Mereka berpendapat bahwa untuk mencegah laju cepatnya peningkatan cacah jiwa penduduk harus dengan method birth control dengan menggunakan alat kontrasepsi.

2.2 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.2.1 Pengaruh pendidikan rendah terhadap kemiskinan rumah tangga.

Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah

negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, PBB menuangkannya dalam 8 tujuan pembangunan milenium pada butir ke 2 yaitu mencapai pendidikan dasar universal (UN, 2011). Indeks pendidikan menjadi salah satu indeks dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM di suatu wilayah maka harus meningkatkan Indeks Kesehatan atau Indeks Pendidikan atau Indeks Kemampuan Daya Beli. Dengan pendidikan yang semakin tinggi maka IPM sebuah daerah akan semakin tinggi pula. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga cukup bervariasi yaitu dari kepala rumah tangga yang berpendidikan tidak tamat SD sampai berpendidikan sarjana.

Opini publik yang patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya (Wahid, 2008). Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin (Carey, 2002). Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Kartono (1992) mengatakan bahwa tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan nasional dalam usaha untuk mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat yang tertib dan disiplin mulai dari tingkat pribadi individu yang paling kecil yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, bahkan tingkat kehidupan individu sebagai makhluk sosial yaitu masyarakat, karena keluarga merupakan unsur paling pokok dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di lingkungan keluarga merupakan tempat penanaman nilai kedisiplinan demi tercapainya pembentukan fisik, mental sepiritual manusia Indonesia yang tangguh. Berdasarkan kenyataan kehidupan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, maka tingkat kedisiplinan dapat dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman yang ada di sekitar mereka.

Perbaikan dan peningkatan akses pendidikan secara gratis adalah salah satu kunci mengatasi masalah rumit pendidikan dan kemiskinan ini. Mengapa pendidikan ini penting untuk mengatasi kemiskinan? Mengutip hasil penelitian Denison (1962) dan Solow (1957), Todaro menyebutkan bahwa sumber utama dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara-negara maju saat ini bukanlah physical capital, melainkan human capital.

Menurut Rahardja dkk (2005) semakin tinggi pendidikan seseorang pengeluaran konsumsinya juga akan semakin tinggi, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan hubungannya positif. Pada saat seseorang atau keluarga memiliki pendidikan yang tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak. Kondisi ini disebabkan karena yang harus mereka penuhi bukan hanya sekedar kebutuhan

untuk makan dan minum, tetapi juga kebutuhan informasi, pergaulan di masyarakat baik, dan kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya.

Pendidikan merupakan suatu investasi yang penting. Dengan mendapatkan pendidikan pendidikan yang baik, maka seseorang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Maka dari itu, dengan pendidikan seseorang atau rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi dan memberantas kemiskinan melalui efek yang ditimbulkan yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

2.2.2 Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan rumah tangga

Jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga, semakin banyak jumlah anggota, maka kebutuhan akan konsumsinya juga semakin banyak. Apabila sumber pendapatan yang diperoleh sama, maka rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga lebih banyak akan mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi miskin. Hal ini karena pendapatan yang diperoleh rumah tangga dibagi atau untuk membiayai seluruh anggota rumah tangga, terutama mereka yang belum mempunyai penghasilan. Dengan kata lain bahwa semakin banyak anggota rumah tangga yang harus ditanggung, maka semakin berat beban ekonomi suatu rumah tangga dan menjadi tugas kepala rumah tangga.

Jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Banyaknya anggota keluarga, maka

pola konsumsinya semakin bervariasi karena masing-masing anggota rumah tangga belum tentu mempunyai selera yang sama. Jumlah anggota keluarga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga yang akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga tersebut.

Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

2.2.3 Pengaruh Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan rumah tangga

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga

menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.

Menuru Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan

pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

2.2.4 Pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap kemiskinan rumah tangga

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Darwis dan Nurmanaf, 2001). Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang menjadikan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif.

Rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang tidak cukup, modal ataupun keterampilan, faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. walaupun ada hanya relatif kecil, pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian, karena pertanian bekerja atas dasar musiman, makan kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin sehingga untuk membiayai keluarga kurang, sehingga menjadi keluarga miskin.

Untuk kepentingan program pengentasan kemiskinan dan penentuan masyarakat yang miskin dibentuk pula konsep pengukuran kemiskinan. Sajogyo

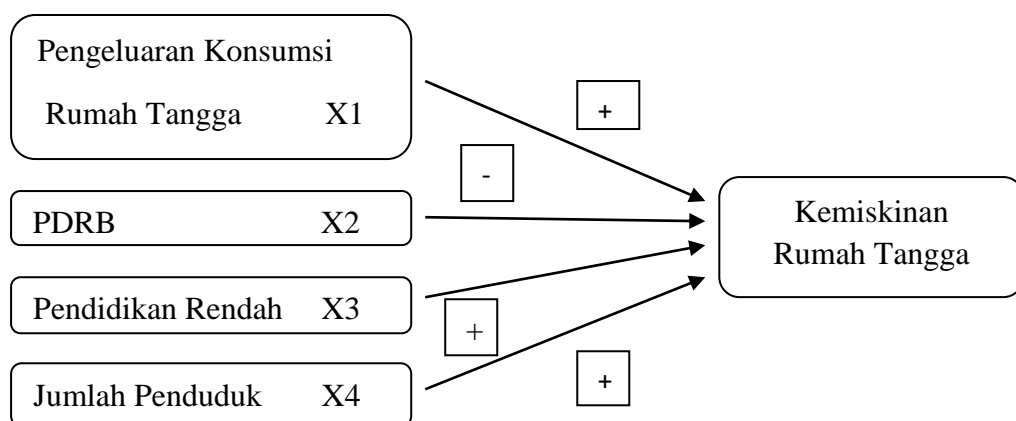
(1978) mengukur batas kemiskinan dari tingkat penghasilan/pengeluaran rumah tangga setara beras per kapita per tahun yaitu dibuat 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa. Sementara Sajogyo (1982) dalam Suhardjo, 1997 melakukan stratifikasi kemiskinan dengan membagi golongan penduduk menjadi tiga strata yaitu paling miskin, miskin sekali dan miskin.

2.3 Hipotesis

Menurut Hasan (2000) Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Setelah ditentukan hipotesis maka diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Diduga Pendidikan Rendah berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta

